

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Oleh

**HERAH WATI BINTI TAHIR
10573 05459 15**



**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GOWA

OLEH

HERAH WATI BINTI TAHIR

10573 05459 15

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi

Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan sebagai tanda baktiku kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu berdoa demi kesuksesan anaknya yang menjadi penyemangat dikala rasa putus asa mulai muncul serta bingkisan sayang buat keluarga besarku, dan sahabatku serta orang-orang yang selalu menyayangiku.

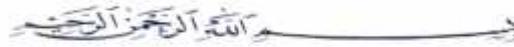
MOTTO HIDUP

“ The 3 C's in life : Choice, Chance, Change. You must make the Choice, to take the Chance, if you want anything in life to Change. “



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln.Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa."

Nama Mahasiswa : Herah Wati Binti Tahir
No Stambuk/NIM : 10573 05459 15
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.Ak.CA
NIDN: 0916096601

Pembimbing II

Dr. Muchriana Muchran, SE.,M.Si.Ak.CA
NIDN: 0930098801

Mengetahui :

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln.Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar

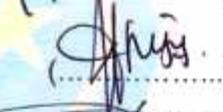


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **HERAH WATI BINTI TAHIR** NIM : **10573 05459 15**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 145/ Tahun 1440 H/ 2019 M. Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM
(WD/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
 1. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP 
 2. Saida Said, SE., M. Ak. 
 3. Wa Ode Rayyani, SE., M.Si. Ak. CA 
 4. Asriati, SE., M. Si 



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herah Wati Binti Tahir
Stambuk : 10573 05459 15
Program Studi : Akuntansi
Dengan judul : "Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi
Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa "

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,




Herah Wati Binti Tahir

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi,



Tasmal Badollahi, SE.,MM

NBM: 903078

Dr. Tasmal Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP

NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kemampuan untuk berpikir yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam dan shalawat juga semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan sempurna bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Skripsi dengan judul **“Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa”** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Tahir Mohammad dan Ibunda Ramlah Idris yang telah

mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayangnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA., CSP, Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si. Ak. CA sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian ini.
5. Ibu Dr. Muchriana Muchran, SE., M.Si. Ak. CA sebagai dosen pembimbing II yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Alauddin Makassar yang selama ini telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh staf akademik dan tata usaha serta staf jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Alauddin Makassar.

8. Bapak Kepala Badan beserta jajaran di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang telah memberikan izin dan kerjasamanya kepada penulis dalam melakukan penelitian.
9. Sahabat seperjuangan ku yang selama ini telah memberikan doa, semangat dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. Serta buat para sahabat yang telah membantu menemani dan memberikan dukungan yaitu Hikmah, Lidia, Ana dan Ayu yang memberikan bantuan dan semangat setiap menemui kesulitan.
10. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2015 khususnya Ak 15 H. Kebersamaan dan ketulusan kalian merupakan hal yang terindah dan selalu akan diingat, semoga kekeluargaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga serta harapan dan cita-cita kita bersama dapat terwujud.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak terutamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah - mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 24 Juli 2019

Penulis

ABSTRAK

HERAH WATI BINTI TAHIR, Tahun 2019 . Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I, Bapak Ansyarif Khalid dan Pembimbing II, Ibu Muchriana Muchran.

Penelitian ini membahas tentang penggunaan SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah di Kabupaten Gowa dengan tujuan mengetahui efektivitas penggunaan SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Gowa. Untuk menjawab permasalahan diatas dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan wawancara dan beberapa data sekunder pendukung lainnya dari situs resmi entitas. Kemudian peneliti menganalisis data dan menginterpretasikan data yang didapatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah di Kabupaten Gowa saat ini belum begitu efektif. Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur dan masalah kesiapan SDM. Walaupun SIMDA Keuangan belum efektif diterapkan, tetapi dengan penerapan SIMDA Keuangan dapat mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Gowa selaku Inspektorat Daerah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Diterapkannya SIMDA Keuangan maka transparansi sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah jadi lebih terlihat karena mampu menguraikan secara jelas dan rinci alur dari setiap transaksi keuangan ditambah laporan keuangan yang dihasilkan mampu memberikan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku .

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Efektivitas, SIMDA

ABSTRACT

HERAH WATI BINTI TAHIR, 2019. Usage Effectiveness of Accounting Information Systems in Local Government Gowa, Thesis Accounting Studies Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by the Supervisor I, Mr. Ansyarif Khalid and Advisor II, Ms. Muchriana Muchran.

This thesis discusses the use of SIMDA Finance as the accounting information system of the area in Gowa in order to know the effectiveness of implementing the Financial SIMDA. This research is expected to benefit the Gowa district government. To answer the above problems in the writing of this paper the author uses descriptive qualitative approach. In collecting data using interviews and several other supporting secondary data from the official website of the entity. Then the researchers analyzed the data and interpret the data obtained.

The results showed that the application of the Financial SIMDA as accounting information systems area in Gowa currently not so effective. This is related to the issue of infrastructure and the readiness of human resources. Although SIMDA Finance has not effectively implemented, but with the implementation of the Financial SIMDA to facilitate the implementation of financial management. The area of financial supervision system in Gowa as Regional Inspectorate has conducted its duties in accordance with the Regulation has been determined. Financial SIMDA implementation of the transparency of the financial management system of the Local Government more visible because it can spell out clearly and in detail the flow of every financial transaction plus the resulting financial statements are able to provide financial information in a timely, complete, accurate and reliable according to applicable regulations.

Keywords : Accounting Information Systems, Effectiveness, SIMDA

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PESEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Sistem Informasi Akuntansi	8
B. Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi.....	19
C. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.....	22
D. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	27
E. Penelitian Terdahulu.....	30
F. Kerangka Konsep.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Fokus Penelitian	35

C. Lokasi Dan Situs Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Instrumen Penelitian	38
G. Metode Analisis	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
2. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah.....	53
B. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Fikir	34
Gambar 4.1 Profil Pemerintah Kabupaten Gowa	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dari pengaruh globalisasi sekarang ini begitu pesat yang diikuti dengan perkembangan sistem informasi yang berbasis teknologi, telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat di dalam berbagai bidang. Perkembangan teknologi informasi mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi bisnis, khususnya dalam pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual digantikan dengan sistem komputer sebagai alat pemrosesan data.

Penggunaan teknologi informasi di era sekarang ini merupakan elemen penting dalam aktivitas perusahaan. Sistem informasi membawa pengaruh besar terhadap hampir semua aspek dalam pengelolaan bisnis, termasuk dalam pengelolaan perbankan. Perkembangan sebuah sistem informasi juga perlu didukung oleh banyak faktor yang diharapkan bisa memberikan keberhasilan dari sistem tersebut. Keberhasilan aplikasi sistem informasi pada suatu perusahaan atau perbankan dipengaruhi dari cara sistem itu dijalankan, tingkat kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan.

Berkembang dan majunya teknologi yang pesat akhir-akhir ini serta berkembangnya sistem informasi yang berbasis teknologi menyebabkan tidak hanya membawa pengaruh pada pengelolaan perusahaan, tetapi juga telah memberikan pengaruh yang signifikan pada sistem informasi akuntansi organisasi bisnis. Berkembangnya teknologi yang sangat pesat untuk saat ini,

sangatlah berpengaruh pada perkembangan sistem informasi akuntansi (SIA). SIA yang menjadi suatu bagian yang sangat penting dalam sistem informasi yang dapat menerima data mentah keuangan dan memprosesnya menjadi suatu informasi untuk kepentingan baik untuk kepentingan luar dan dalam suatu organisasi.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan kumpulan sumber daya manusia (SDM) beserta modal yang memiliki tugas dalam menyiapkan informasi keuangan dan informasi lainnya. Pemakaian sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan dilihat dari seorang pengguna komputer meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan komputer, dengan demikian semakin mahir pemakai maka akan semakin efektif penerapan sistem informasi akuntansi di suatu perusahaan yang akan mengakibatkan meningkatnya kinerja individual yang bersangkutan. Namun jika teknologi informasi tidak diterapkan secara maksimal oleh individu pengguna sistem informasi akuntansi, maka akan berakibat pada menurunnya kinerja individu.

Teknologi informasi memiliki peran yang strategis dan signifikan, selain itu bagi organisasi merupakan keharusan untuk mampu menguasai secara teknis. Agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja, maka anggota dalam organisasi harus dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi dapat dikatakan berhasil jika dapat meningkatkan kinerja karyawan, yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan adanya penerapan sistem informasi dan teknologi informasi tersebut perusahaan perlu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM). Semakin efektif sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi informasi, maka akan

semakin efektif pula informasi-informasi yang dapat dihasilkan. Semakin akurat informasi yang dihasilkan dari penggunaan teknologi informasi maka akan jauh lebih memudahkan kinerja karyawan, dan kinerja karyawan tentu akan lebih efektif. Teknologi informasi dapat menjadi senjata strategis untuk mendukung objek dan strategi organisasi. Sistem informasi akuntansi merupakan variabel yang paling mempengaruhi kinerja keuangan.

Beberapa organisasi bisnis mendapatkan keunggulan kompetitif dengan melengkapi sistem informasi baru. Pemakaian sistem informasi dilandasi dengan prinsip yang mampu memotivasi pemakai sistem untuk bertindak sesuai dengan (*comply*) dan sesuai (*conform*) keyakinannya atas pentingnya sistem informasi tersebut. Secara umum sistem yang efektif didefinisikan sebagai sistem yang dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan, sehingga diharuskan kepada setiap sistem untuk dapat memberikan pengaruh positif kepada pemakainya. Efektivitas penggunaan dan pengimplementasian teknologi sistem informasi didalam perusahaan dapat dilihat dari cara pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data, dan menginterpretasikan data tersebut.

Peran teknologi informasi dalam suatu perusahaan atau organisasi sangatlah penting untuk membantu dalam perbaikan proses bisnis dan pengambilan keputusan. Proses bisnis dan pengambilan keputusan akan lebih baik lagi apabila perusahaan melakukan penerapan teknologi informasi dengan baik dan benar sehingga dibutuhkan proses pengendalian intern yang baik terhadap aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang ada dalam perusahaan. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja individu seseorang adalah dengan melakukan pemberian insentif bagi karyawan yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang

diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk material atau non material yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi perusahaan kepada karyawannya dengan tujuan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuantujuan perusahaan, dengan kata lain pemberian insentif adalah pemberian uang diluar gaji sebagai pengakuan perusahaan terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawan.

Sistem informasi yang digunakan dalam perusahaan adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan manusia dan sumber modal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan data transaksi Akuntansi sebagai bisnis, sistem bahasa, dan informasi harus menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang akan disampaikan kepada para pengguna laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi di anggap sebagai faktor penting dalam pencapaian kinerja yang lebih besar terutama dalam proses pengambilan keputusan. SIA memiliki banyak peran penting bagi perusahaan, seperti memperbaiki kualitas, dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang dan jasa, memperbaiki pengambilan keputusan dan menciptakan keunggulan yang kompetitif.

Adanya sistem informasi akuntansi yang baik, perusahaan dapat melakukan proses operasi maupun informasi dengan lebih efektif dan efisien karena adanya pengendalian yang mengendalikan proses-proses tersebut sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Efektivitas

penggunaan sistem informasi akuntansi pada perusahaan atau Bank tergantung pada kemampuan teknik yang dimiliki pemakai sistem informasi akuntansi karena kemampuan teknik sangat mempengaruhi kinerja pemakainya . Keberhasilan efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi pada perusahaan berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Efektivitas penggunaan SIA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya kerja memiliki tujuan utama dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan yaitu untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja dan sekaligus sebagai upaya strategis di dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat di kemukakan adalah bagaimana efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ulasan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek :

1. Aspek Teoritis

Untuk memberikan wawasan yang luas bagi para akademisi dimana dapat menambah pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah terutama mengenai sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada semua pihak yang menggunakan laporan keuangan terkait dengan komponen-komponen apa saja yang ada didalamnya dan memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat mengenai sistem akuntansi yang diterapkan di dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.

2. Aspek Praktis

Memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai penerapan praktik system informasi akuntansi, terutama dalam sistem pencatatannya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Dan juga sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah khususnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk dijadikan sebagai wacana dan referensi dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan-kebijakan yang hendak diterapkan. Serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang penerapan system informasi akuntansi dalam sektor publik.

3. Aspek Regulasi

Dalam aspek regulasi penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan untuk memperhatikan aspek yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

a) Sistem

Sistem menurut Jerry Fitzgarld dalam Lilis (2010) sebagai berikut: "Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu". Menurut Widjajanto dalam Ridwan (2014) sistem adalah: "Sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahap yaitu input, proses, dan output".

Adanya beberapa pendapat tersebut maka dapat dinyatakan bahwa sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara terencana terjadi.

b) Sistem Informasi

Sistem informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Karakteristik informasi yang *realible* harus memenuhi syarat *relevan*, tepat waktu, akurat, dan lengkap. Sistem informasi merupakan komoditas yang sangat penting bagi perusahaan, karena dengan adanya sistem informasi akan membantu dalam operasi dan pengambilan keputusan sehari-hari. Berikut ini penjelasan mengenai sistem informasi dari berbagai pendapat ahli:

Menurut Azhar Susanto dalam Lilis (2010) "Sistem informasi merupakan komponen-komponen dari subsistem yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi".

Masih di dalam Lilis, Robert A. (2010) mengungkapkan sistem informasi sebagai berikut: "Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung kegiatan operasi sehari-hari, bersifat manajerial dan kegiatan suatu organisasi dan menyediakan pihak-pihak tertentu dengan laporan- laporan yang diperlukan".

Berdasarkan pengertian sistem informasi dari beberapa ahli dapat dinyatakan bahwa sistem informasi tidak akan bekerja tanpa adanya kerjasama yang harmonis antara komponen- komponen yang membentuknya dan menghasilkan suatu tujuan untuk mengubah data menjadi suatu informasi yang dapat dibutuhkan oleh pengguna informasi.

c) Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi menurut Krismiaji (2010) adalah "Sebuah sistem yang memproses data dari transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis".

Lilis P. dan Sri Dewi A. (2010) "Sistem informasi akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan dan dapat memudahkan pengelolaan perusahaan".

Terdapat beberapa definisi sistem informasi akuntansi menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

Sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:72) adalah:

“Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan dan bekerjasama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.”

Menurut Romney dan Steinbart dalam marianus sinaga (2009:28) sistem informasi akuntansi adalah:

“Sistem informasi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data sehingga menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan.”

Sedangkan menurut Bodnar dan Hopwood (2010:1) sistem informasi akuntansi adalah:

“An accounting information system is a collection of resources, such as people and equipment, design to transform financial and other data into information.”

Pernyataan yang dikemukakan oleh Bodnar dan Hopwood menjelaskan bahwa:

“Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi.”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari sumber daya yang akan mentransformasi data-data keuangan menjadi sebuah informasi keuangan yang di olah baik secara manual maupun terkomputerisasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Dari pengertian diatas maka dapat dinyatakan sistem informasi akuntansi juga mempunyai pengertian serangkaian kegiatan administratif perusahaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan transaksi keuangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan untuk mendukung ketepatan pengambilan keputusan.

d) Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan sistem informasi akuntansi sebagai penunjang utama manajemen dalam melaksanakan bisnis perusahaan. Setiap perusahaan yang didirikan pasti mempunyai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut manager sangat membutuhkan suatu alat yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut, salah satu alat tersebut adalah sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang penting dan diperlukan oleh pimpinan perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Sistem informasi akuntansi harus dapat menjaga aktiva perusahaan, dengan pengendalian yang baik dalam suatu sistem informasi akuntansi. Maka penyelewengan, penggelapan harta perusahaan, dan kesalahan dapat diminimalis. Menurut Krismiaji dalam Ridwan (2014, h. 13) menguraikan tentang tujuan sistem informasi akuntansi sebagai berikut:

1. Kemanfaatan

Informasi yang dihasilkan oleh sistem harus membantu manajemen dan para pemakai dalam pembuatan keputusan.

2. Ekonomis

Manfaat sistem harus melebihi pengorbanannya.

3. Daya Andal

Sistem harus memproses data secara akurat dan lengkap.

4. Ketersediaan

Para pemakai harus dapat mengakses data seaman mungkin, kapan saja pemakai menginginkannya.

5. Ketepatan Waktu

Informasi penting harus dihasilkan lebih dahulu, kemudian baru informasi lainnya.

6. Servis Pelanggan

Servis pelanggan yang memuaskan harus diberikan.

7. Kapasitas

Kapasitas sistem harus mampu menangani kegiatan pada periode sibuk dan pertumbuhan di masa mendatang.

8. Praktis

Sistem harus mudah digunakan.

9. Fleksibel

Sistem harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan sistem.

10. Daya Telusur

Sistem harus mudah dipahami oleh pemakai dan perancang, dan memudahkan penyelesaian persoalan serta pengembangan dimasa mendatang.

11. Daya Audit

Daya audit harus ada dan melekat pada sistem sejak awal pembuatan.

12. Keamanan

Hanya personil yang berhak saja dapat mengakses dan dijadikan mengubah data sistem.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa suatu sistem informasi akuntansi harus berguna, tepat waktu, dan relevan untuk pengambilan keputusan, serta meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam memberikan informasi dari segi intern dan ekstern yang akan berguna bagi manajemen dalam rangka mencapai tujuan suatu perusahaan.

e) Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi yang baik dalam pelaksanaannya diharapkan akan memberikan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pihak manajemen maupun pemakai-pemakai informasi lainnya dalam pengambilan keputusan.

Fungsi sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:8) adalah:

1. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari.
2. Mendukung proses pengambilan keputusan.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal.

Sedangkan fungsi sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart (2009:29) adalah:

1. *Collecting and store data about organizational activities, resources and personel.*
2. *Transforming data into information that is useful for making decisions so management can plan, execute, control, and evaluate activities, resources and personnel.*
3. *Provide adequate controls to safeguard the organization"s assets, including its data, to ensure that the assets and data are available when needed and the data are accurate and reliable.*

Berdasarkan pernyataan Romney dan Steinbart dapat Dijelaskan Bahwa fungsi sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivias organisasi, sumber daya dan pribadi.
2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna untuk membuat keputusan sehingga manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan, sumber daya dan personel.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asset organisasi, termasuk data, untuk memastikan bahwa asset dan data yang tersedia bila diperlukan data yang akurat dapat diandalkan.

Berdasarkan pernyataan fungsi sistem informasi akuntansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi menjadi pendukung bagi suatu organisasi atau manajemen. Di mana tujuan utama sistem informasi akuntansi di bangun untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi suatu informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam

pemakai yang tujuannya untuk mengambil suatu keputusan. Untuk itu sistem informasi akuntansi harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi dengan efektif dan efisien.

f) **Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi**

Dalam sistem informasi akuntansi terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan pedoman bagi petugas akuntansi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Menurut Susanto (2013) “Terdapat beberapa unsur-unsur sistem informasi akuntansi yaitu:

1. *Hardware*

Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.

2. *Software*

Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada computer.

3. *Brainware* (sumber daya manusia)

Brainware (sumber daya manusia) merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi akuntansi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut.

4. *Prosedur*

Merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

5. *Database dan sistem manajemen database*

Database merupakan kumpulan dari data-data, sedangkan manajemen data merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi yang membantu perusahaan agar sumber daya informasi yang dimilikinya mencerminkan secara akurat sistem fisik yang mewakilinya.

6. Teknologi jaringan telekomunikasi

Telekomunikasi atau komunikasi data dapat didefinisikan sebagai penggunaan media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau informasi dari satu lokasi ke satu beberapa lokasi lain yang berbeda”.

Menurut Krimiaji (2010) “Secara garis besar, sebuah sistem informasi memiliki delapan komponen atau unsur, yaitu:

1. Tujuan

Setiap sistem informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang memberikan arah bagi sistem tersebut secara keseluruhan.

2. *Input*

Data harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai *input* ke dalam sistem dan sebagian besar *input* berupa data transaksi.

3. *Output*

Merupakan informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem.

4. Penyimpanan Data

Data yang sering disimpan untuk dipakai lagi di masa mendatang dan data yang tersimpan ini harus diperbarui (*updated*) untuk menjaga keterkinian data.

5. Pemroses

Pemroses data untuk menghasilkan informasi dengan menggunakan komponen pemroses.

6. Instruksi dan prosedur

Sistem informasi akuntansi tidak dapat mengolah untuk menghasilkan informasi tanpa adanya instruksi dan prosedur secara rinci.

7. Pemakai

Orang yang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan informasi yang dihasilkan sistem.

8. Pengamanan dan pengawasan

Informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi harus akurat, bebas dari berbagai kesalahan dan terlindungi dari aksesakses yang tidak sah.

Dari beberapa uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk dapat menghasilkan informasi yang berkualitas sehingga pengambilan keputusan dapat diambil secara cepat dan tepat.

g) Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Mardi (2011) ada enam karakteristik sistem informasi akuntansi yang membuat suatu sistem berguna dan memiliki arti penting bagi pengambilan keputusan perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Relevan

Informasi harus memiliki makna yang tinggi sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi yang menggunakannya dan dapat digunakan secara tepat untuk membuat keputusan.

2. Andal

Suatu informasi harus memiliki keterandalan yang tinggi, informasi yang dijadikan alat pengambil keputusan merupakan kejadian nyata dalam aktivitas perusahaan.

3. Lengkap

Informasi tersebut harus memiliki penjelasan yang rinci dan jelas dari setiap aspek peristiwa yang diukurnya.

4. Tepat waktu

Setiap informasi harus dalam kondisi yang *update* tidak dalam bentuk yang *using*, sehingga penting untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan.

5. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam bentuk yang jelas akan memudahkan orang dalam menginterpretasikannya.

6. Dapat diverifikasi

Informasi tersebut tidak memiliki arti yang ambigu, memiliki kesamaan pengertian bagi pemakainya”.

Menurut Krismiaji (2010), terdapat enam karakteristik, yaitu sebagai berikut:

1. Relevan

Menambah pengetahuan atau nilai bagi para pembuat keputusan dengan cara mengurangi ketidakpastian, menaikkan kemamuan untuk memprediksi atau menegaskan/mebenarkan ekpektasi semula.

2. Dapat dipercaya

Bebas dari kesalahan atau bias dan secara akurat menggambarkan kejadian atau aktivitas organisasi.

3. Lengkap

Tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para pemakai.

4. Tepat waktu

Disajikan pada saat yang tepat untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Mudah dipahami

Disajikan dalam format yang yang mudah dimengerti.

5. Dapat diuji kebenarannya

Memungkinkan dua orang yang kompeten untuk menghasilkan informasi yang sama secara independen.

B. Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi

a) Pengertian Efektivitas

Untuk mendefinisikan suatu efektivitas sangat berhubungan dengan tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai organisasi.

Menurut Anthony (2004: 14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas adalah hubungan antara output yang dihasilkan oleh pusat pertanggung jawaban dengan tujuan jangka pendek (objektivitas), semakin besar output yang dikontribusikan terhadap jangka pendek perusahaan, maka semakin efektif unit tersebut .”

Handoko (1999) dalam Jumaili (2005) mengemukakan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah di tetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar.

Yamit (1998) dalam Jumaili (2005) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai, baik

secara kualitas maupun waktu, orientasinya adalah pada keluaran (output) yang dihasilkan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah upaya suatu organisasi untuk mencapai tujuan dengan tepat waktu dan hasil sesuai dengan yang diharapkan menggunakan sumberdaya dan sarana yang ditetapkan. Efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang penting untuk melihat gambaran suatu organisasi karena dapat menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Pengukuran efektivitas organisasi merupakan suatu hal yang sangat rumit karena dalam organisasi yang sangat besar dengan banyak bagian yang sifatnya, berbeda dan mempunyai sasaran yang berbeda antara satu sama lain.

b) Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi

Efektivitas merupakan ukuran mengenai seberapa baik pekerjaan dapat dikerjakan dan sejauh mana seseorang mampu menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas sistem didasarkan pada kontribusinya dalam pembuatan keputusan, kualitas informasi akuntansi, evaluasi kinerja, pengendalian internal yang memfasilitasi transaksi perusahaan (Kristiani, 2012).

Menurut Yamit (2003) dalam Sinarwati (2014) efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat dicapai baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya adalah pada keluaran (output) yang dihasilkan. Perancangan elemen sistem dalam sistem informasi akuntansi berbasis komputer sangat berpengaruh terhadap efektivitas suatu sistem informasi akuntansi berbasis komputer.

Efektivitas penggunaan atau pengimplementasian teknologi sistem informasi didalam perusahaan dapat dilihat dari cara pemakai dalam

mengidentifikasi data, mengakses data, dan menginterpretasikan data tersebut (Jumaili, 2005).

Penggunaan teknologi dalam sistem informasi perusahaan hendaknya mempertimbangkan pemakai (Irwansyah dalam Jumaili, 2005). Tidak jarang ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi sering tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh individu pemakai sistem informasi, sehingga sistem informasi kurang memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja individual.

Handoko (1999:7) mengemukakan bahwa “efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”. Kemampuan untuk memilih tujuan atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar disebut efektivitas. Secara umum, efektivitas merupakan sebagai alat ukur tercapainya kesuksesan atau tujuan yang ditetapkan (Wirawan, 2016). Menurut (Sari 2008) Efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya adalah pada keluaran (*output*) yang dihasilkan. Efektivitas sistem didasarkan pada kontribusinya dalam pembuatan keputusan, kualitas informasi akuntansi, evaluasi kerja, pengendalian internal yang memfasilitasi transaksi suatu perusahaan (Sajady, Dastgir, dan Nejad, 2008).

Yamit dalam Sari (2008) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya adalah pada keluaran (*output*) yang dihasilkan. Jumaili (2005) mengemukakan secara umum efektivitas penggunaan

atau pengimplementasian teknologi sistem informasi dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari kemudahan pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data dan menginterpretasikan data tersebut. Data dalam sistem informasi tersebut seharusnya merupakan data yang terintegrasi dari seluruh unit perusahaan atau organisasi sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan tugas dalam perusahaan.

Jumlah sarana komputer dalam perusahaan juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi perusahaan. Semakin banyak fasilitas pendukung yang disediakan bagi pemakai, maka akan semakin memudahkan pemakai mengakses data yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas individu dalam perusahaan atau organisasi. Diharapkan dengan penggunaan teknologi sistem informasi, individu dari perusahaan atau organisasi yang merupakan pemakai sistem tersebut dapat menghasilkan *output* yang semakin baik dan kinerja yang dihasilkan tentu akan meningkat (Jumaili, 2005).

Penggunaan sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan sebaiknya didukung oleh kemampuan personal pemakai sistem informasi tersebut, sehingga SIA dapat berjalan secara efektif dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan individu itu sendiri (Putra, 2016). Secara umum efektivitas penggunaan atau implementasi teknologi sistem informasi dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari kemudahan pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data dan menginterpretasikan data tersebut.

C. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah, diperlukan sistem yang mengatur proses

pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai yang dihasilkan dari laporan keuangan yang disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007).

Efektivitas sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang diterima manajemen untuk membantu keputusan yang bersangkutan. Efektivitas sistem informasi akuntansi adalah ukuran keberhasilan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan sistem informasi akuntansi dapat diartikan penerapannya menguntungkan, menjadi perhatian utama organisasi, memberikan kepuasan bagi banyak pengguna dan meningkatkan kualitas kinerja mereka (Moscove et. al, 2009).

Proses sistem informasi akuntansi terdiri dari input, output, penyimpanan data, prosesor, pengguna, dan tindakan pengendalian. Data dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem informasi. Data berarti dan berguna, oleh karena itu harus diproses dan diubah ke bentuk yang bermakna, terorganisir, dan berguna yang disebut informasi. Output adalah informasi yang berarti dan berguna yang dihasilkan oleh sistem informasi.

Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada sistem akuntansi pemerintah, ada beberapa ciri terpenting atau persyaratan yang diperlukan, diantaranya: sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi.

Sistem informasi akuntansi pada pemerintahan daerah lebih dikenal dengan nama Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010).

Pemerintahan daerah sebagai organisasi sektor publik, agar dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan bersih diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi yang memadai agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk manajemen keputusan dan pengendalian keputusan. SIKD

yang diterapkan di pemerintah daerah sesudah periode 2005 berbasis desentralisasi, pengguna SIKD adalah Kepala Daerah, bahkan memungkinkan dan mengharuskan para manajer pemerintah (perangkat) daerah (Kepala Badan, Kantor, Dinas dan Unit lainnya) untuk menggunakan SIKD, sebab Kepala Daerah bukan satu-satunya pengambil keputusan penganggaran, namun telah terdistribusi ke unit-unit yang lebih bawah.

Tujuan penyelenggaraan SIKD, diantaranya membantu Kepala Daerah menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan kebijakan keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan, menyediakan kebutuhan statistik keuangan, menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dan mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD nasional (PP 65/2010). Pengelolaan keuangan Daerah diatur dalam PP 58/2005 dan Pemendagri 13/2006 Pasal 3 mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan aplikasi yang mempunyai peran sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan SKPD selaku

pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dengan demikian sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) merupakan sistem terkomputerisasi yang baru diimplementasikan beberapa tahun belakangan ini di Departemen Dalam Negeri RI, khususnya pada Direktorat Jendral Biro Administrasi Keuangan Daerah. Tujuannya tidak lain untuk mengatur dan memantau jalannya perumusan APBD hingga pelaksanaannya di setiap daerah. Sistem tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bersangkutan. Kehadiran SIKAD membawa manfaat dalam menjalankan akuntansi keuangan yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Untuk menjalankan proses SIKAD diperlukan prosedur-prosedur yang dapat mempermudah dalam menjalankan SIKD secara benar. Prosedur dalam berbagai modul dijelaskan secara terperinci dan secara kronologi yang tepat dan tidak menyulitkan.

D. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Dalam mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan oleh BPKP untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi Pemerintah Daerah baik ditingkat pelaporan ataupun ditingkat akuntansi. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan, perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Suatu sistem dikatakan berjalan secara efektif, apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan berbagai konstituen yang ada dalam organisasi, baik secara individual maupun secara kelompok (Ranti, 2013). Dengan demikian output dari aplikasi ini adalah sebagai berikut :

1. Penganggaran: Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), APBD beserta perubahannya, dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
2. Penatausahaan: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian lainnya;
3. Akuntansi dan Pelaporan: Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Neraca.

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis akrual memerlukan dukungan program yang mampu mengelola ribuan transaksi secara cepat, tepat, dan akurat serta didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola sistem tersebut sehingga menghasilkan capaian target yang maksimal. Sementara itu dukungan infrastruktur aplikasi SIMDA masih belum optimal karena tidak semua wilayah SKPD dapat diakses.

Penerapan SIMDA pada pemerintah daerah sebagai suatu organisasi sector publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan pada lingkungan pemerintah daerah tersebut. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya dan aset yang ada pada pemerintah daerah tersebut (Alfian, 2014). Dasar hukum yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIMDA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
12. Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah
14. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006
15. Permendagri Nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus
16. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perubahan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan, penerapan sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, kesesuaian tugas dengan teknologi dan keahlian pemakai computer yang berhubungan dengan kinerja karyawan. Penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda dan penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan referensi.

Penelitian tentang pengaruh efektivitas penggunaan dan kepercayaan atas teknologi sistem informasi akuntansi telah dilakukan sebelumnya oleh Septiningtyas (2010). Penelitian ini berfokus pada kinerja auditor internal yang sedang mengikuti pelatihan di Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA). Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dan kepercayaan atas teknologi sistem informasi akuntansi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor internal.

Menurut Ratnaningsih dan Suaryana (2014) kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, dan pengetahuan manajer akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi (SIA). Manajemen yang ikut berpartisipasi dan terlibat dalam penerapan dan pengembangan sistem informasi akuntansi menjadi suatu salah satu faktor keberhasilan sistem informasi akuntansi dalam menghasilkan kualitas informasi yang bermanfaat, tepat waktu, efektif dan efisien. Perencanaan dan pengembangan teknologi informasi yang semakin canggih akan memberikan kualitas informasi yang semakin meningkat.

Menurut Efendi (2016) pengetahuan karyawan bagian akuntansi, partisipasi manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh

terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Semakin tinggi tingkat partisipasi manajemen akan meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi. Pihak manajemen yang mendukung penuh akan bermanfaat dalam pencapaian keefektifitasan dari sistem informasi akuntansi. Semakin besar tingkat perusahaan maka semakin canggih sistem informasi yang dimiliki. Teknologi informasi menjadi sumber kekuatan yang memberikan keunggulan bagi perusahaan dan memberikan pengaruh bagi keberhasilan perusahaan.

Menurut Karmita (2015) pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Pemanfaatan sarana teknologi informasi dapat meminimalisir kesalahan yang terdapat dalam pengolahan data manual. Pengelolaan data yang lebih efisien dan cepat akan memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Alannita dan Suaryana (2014) kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, dan kemampuan teknik pemakai berpengaruh positif pada kinerja individu. Kinerja yang baik dapat terlihat dari keberhasilan individu dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan didukung oleh kemajuan teknologi informasi.

Menurut Saifulloh (2016) kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, dan kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja individu. Penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas kinerja individu dan menjadi keunggulan kompetitif. Sistem informasi akuntansi menjadi bagian penting bagi pihak manajemen perusahaan dan digunakan untuk kepentingan aktivitas manajemen

perusahaan serta melaporkan hasil akhir kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Menurut Suratini, dkk (2015) efektivitas sistem informasi akuntansi dan penggunaan TI akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual. Tingkat efektif suatu sistem dapat ditentukan dari seberapa besar sistem itu mampu mempengaruhi pekerjaan individu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Sugiartini dan Dharmadiaksa (2016) mengungkapkan bahwa efektivitas teknologi sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kinerja individu. Semakin tinggi tingkat efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi dalam lingkup organisasi, maka kinerja individu yang dihasilkan akan semakin meningkat.

Chrisputri Widiarti, Kartika Hendra Ts dan Anita Wijayanti (2018) mengungkapkan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Nasmoco Abadi Motor. Hal ini dikarenakan para karyawan belum dapat mengukur seberapa efektif informasi dan laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi untuk kinerja yang lebih baik. Kesesuaian tugas berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini mengindikasikan bahwa jika tugas yang dikerjakan dengan sistem informasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka semakin meningkat kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Keahlian pemakai tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti keahlian pemakai tidak menjamin meningkatnya kinerja karyawan.

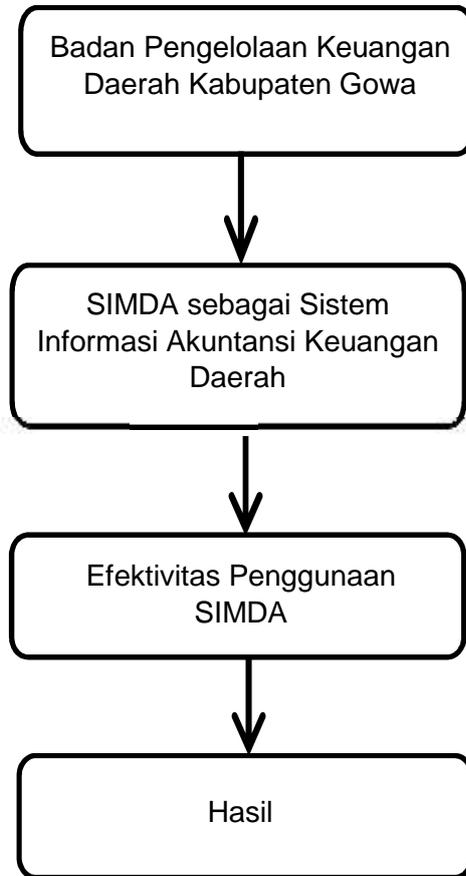
Astri Whidawati dan I Gst. Ayu Eka Damayanthi (2018) menyatakan efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap

kinerja karyawan pada BPR di Kota Denpasar. Didapati bahwa semakin tinggi tingkat efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi yang dimiliki seseorang, maka cenderung akan meningkat kinerja karyawan. Budaya kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pada BPR di Kota Denpasar. Insentif berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dan menunjukkan bahwa peningkatan pemberian insentif yang diberikan, maka akan dapat meningkatkan potensi kinerja karyawan.

F. Kerangka Fikir

Penelitian ini membahas efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa. Dari penjelasan telaah teori dan berdasarkan pada teori yang relevan kerangka fikir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan pembangunannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut harus memiliki azas transparansi dan akuntabilitas, dan hal ini dimanifestasikan dalam bentuk laporan keuangan daerah.

Maka dengan penerapan SIMDA sebagai sistem informasi akuntansi daerah berguna untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang bersangkutan.



Gambar 2.1
Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan kejadian. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2011:03) yang menyatakan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan Perhitungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada Batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang terjadi. Dipilihnya pendekatan tersebut yaitu karena memberikan pemahaman suatu praktik akuntansi dimana ia diterapkan dan sekaligus berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah penyempurnaan praktik akuntansi itu sendiri dengan memahami suatu praktik akuntansi dimana ia diterapkan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, yang beralamat Jl. Masjid Raya No. 26, Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92114.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang kemudian diklasifikasikan menurut bentuk tanggapan atau respon yaitu diklasifikasikan sebagai data lisan (verbal) karena data yang diperoleh berasal langsung dari informan melalui wawancara. Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang berkompeten di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang variabel, akurat dan relevan. Dalam usaha pengumpulan data yang valid maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

Untuk tercapainya suatu penelitian, maka diperlukan data yang mempunyai validitas tinggi. Adapun yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Metode Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Jenis observasi pada penelitian ini adalah observasi non partisipan observation. Dalam penelitian ini, peneliti datang ke tempat penelitian tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan di tempat penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum situasi dan kondisi di sana.

2. Metode Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden . Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara secara terstruktur. Penggunaan metode dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Gowa. Data-data ini akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa pegawai tersebut.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahannya yang sukar diperoleh,

sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi data atau sumber. Yaitu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Informasi yang diperoleh selalu dibandingkan dan diuji dengan data atau informasi yang lain untuk mengecek kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat ukur yang berbeda.

G. Metode Analisis

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Namun, dalam penelitian ini, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Adapun analisis datanya sebagai berikut :

1. Reduksi Data (data reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul, kemudian mereduksi data. Pada tahap ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, dan berguna. Adapun data yang dirasa tidak dipakai ditinggalkan.

2. Penyajian data (data display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Yaitu usaha mengorganisasi dan memaparkan data secara menyeluruh guna memperoleh gambaran secara lengkap dan utuh.

3. Verifikasi

Setelah data direduksi dan disajikan, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nama Resmi	:	Kabupaten Gowa
Ibu Kota	:	Sungguminasa
Provinsi	:	Sulawesi Selatan
Batas Wilayah	:	Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Gowa Selatan: Kabupaten Takalar dan Jeneponto Barat : Kota Makassar dan Takalar Timur : Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng .
Luas Wilayah	:	1.883,32 Km ²
Jumlah Penduduk	:	823.698 Jiwa
Wilayah Administrasi	:	Kecamatan : 18, Kelurahan : 45, Desa : 122
Website	:	http://www.gowakab.go.id/

Tabel 4.1

Profil Pemerintah Kabupaten Gowa

Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum daerah Kabupaten Gowa, dan gambaran umum mengenai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Gambaran umum Kabupaten Gowa mencakup keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi Kabupaten Gowa. Sedangkan gambaran Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah meliputi uraian tugas, fungsi dan tata kerja serta visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

i. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga,

Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km. Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. Jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2009 sebesar 695.697 jiwa, laki-laki berjumlah 344.740 jiwa dan perempuan sebanyak 350.957 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut 99,18% adalah pemeluk Agama Islam. Curah

hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

b. Kondisi Demografi

Dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Gowa termasuk Kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil Susenas 2007, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 594.423 jiwa. Pada Tahun 2006 jumlah penduduk mencapai 586.069 jiwa, sehingga penduduk pada Tahun 2007 bertambah sebesar 1,43%. Persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng dan Bajeng Barat, yang wilayahnya hanya 11,42% dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa, dihuni oleh sekitar 54,45% penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, yang meliputi sekitar 88,58% wilayah Gowa hanya dihuni oleh sekitar 45,55% penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan geografis daerah tersebut .

Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 tahun) jumlahnya mencapai 31,12%, sedangkan penduduk usia produktif mencapai 63,18% dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70% dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa. Dilihat dari jenis kelamin, maka dari total jumlah penduduk Kabupaten Gowa, terdapat 293.956 atau 49,45% laki-laki dan 300.467 atau 50,55% perempuan. Dengan demikian, secara keseluruhan penduduk laki-laki di Kabupaten Gowa jumlahnya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan seperti yang tampak pada rasio jenis kelamin penduduk yang mencapai 98 artinya ada sejumlah 98 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

c. Visi dan Misi Kabupaten Gowa

1) Visi

“Terwujudnya Gowa yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat”

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan moral dan akhlak yang tinggi serta keterampilan yang memadai.
- b) Meningkatkan interkoneksi wilayah dan keterkaitan ekonomi. Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat.
- c) Meningkatkan penerapan hukum dan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik
- d) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan.

ii. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

a. Uraian Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merupakan badan yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2008 Tanggal 28 Juli 2008, serta Peraturan Bupati Gowa Nomor : 39 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi secara Efektif dan Efisien tersebut, telah ditetapkan aturan bagi para pemegang Jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai Perangkat Daerah dan Unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam Perencanaan, Pengolahan, Penagihan, Penelitian, Pembukuan, Penyuluhan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dinas;
2. Penyusunan rencana strategik dinas;
3. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah;

4. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
5. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 07 Tahun 2008 Tanggal 28 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Gowa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa terdiri atas:

a) Kepala Dinas

b) Sekretariat :

Dalam menyelenggarakan tugas sekretaris dibantu oleh tiga sub bagian terdiri dari:

(1) Sub. Bagian Umum & Kepegawaian

(2) Sub. Bagian Perencanaan & Pelaporan

(3) Sub. Bagian Keuangan

c) Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

(1) Seksi Penetapan PAD

(2) Seksi Pajak Daerah

(3) Seksi Retribusi Daerah

d) Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah :

(1) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

(2) Seksi Pendataan dan Penyuluhan

(3) Seksi Penerimaan dan Penagihan

e) Bidang Akuntansi :

- (1) Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
- (2) Seksi Akuntansi Aset
- (3) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan
- f) Bidang Anggaran :
 - (1) Seksi Penyusunan APBD
 - (2) Seksi Otoritas DPA – SKPD
 - (3) Seksi Perbendaharaan
- g) Bidang Aset Daerah :
 - (1) Seksi Perencanaan Kebutuhan
 - (2) Seksi Analisa Aset
 - (3) Seksi Penghapusan Aset
- h) Kelompok Jabatan Fungsional

1) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2008 Tanggal 28 Juli 2008, serta Peraturan Bupati Gowa Nomor : 39 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, maka untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi secara Efektif dan Efesien tersebut, telah ditetapkan aturan bagi para pemegang Jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai Perangkat Daerah dan Unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menjadi tanggungjawabnya dalam Perencanaan, Pengolahan, Penagihan, Penelitian, Pembukuan, Penyuluhan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut : Perumusan kebijakan teknis dinas :

- a) Penyusunan rencana strategik dinas;
- b) Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Tugas dan Fungsi Sekretaris :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan pelaporan;
- b) Penyelenggaraan kebijakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan pelaporan;
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;

3) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pendapatan Asli Daerah;
- b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pendapatan Asli Daerah; Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah;
- c) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah.

4) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah;

- b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang .

5) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Akuntansi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Akuntansi;
- b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Akuntansi;
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Akuntansi;
- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Akuntansi.

6) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,

menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Anggaran.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
- b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Anggaran;
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Anggaran;
- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Anggaran.

7) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Aset Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Aset Daerah;
- b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Aset Daerah;
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Aset Daerah;
- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Aset Daerah.

b. Visi dan Misi

1) Visi SKPD

Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 5 tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa telah menetapkan visi yang telah dirumuskan dan menjadi komitmen bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Adapun visi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal dan Akuntabel guna mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

2) Misi SKPD

Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras dengan visi yang telah dirumuskan bersama, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merumuskan dan menetapkan misi untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan kualitas pelayanan administrasi Dinas Pengelolaan Keuangan.
- b) Meningkatkan pelayanan publik dan potensi penerimaan keuangan daerah.
- c) Meningkatkan pelayanan penatausahaan anggaran yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
- d) Meningkatkan pelaksanaan tata kelola barang milik daerah yang baik dan berkelanjutan.

- e) Meningkatkan penyusunan laporan keuangan dan akuntansi asset daerah yang transparansi dan akuntabel sesuai dengan kebijakan dan standar akuntansi pemerintah .

Pernyataan Misi tersebut diatas harus diketahui dan dilaksanakan seluruh jajaran pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga seluruh jajaran pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ikut berperan serta sesuai dengan beban tanggungjawabnya guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi.

2. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) merupakan sebuah sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangannya agar dapat mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah [4] yang isinya sebagai berikut:

“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.”

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban amanat pembina penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan SIMDA dengan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan dari penerapan SIMDA ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

Pemerintah Kabupaten Gowa sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sejak tahun 2015 yang sebelumnya menggunakan sistem manual atau penyusunannya menggunakan Microsoft Excel. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:

“Sistem yang digunakan bukanlah 100% manual yang artinya sistem yang digunakan hanya belum berbasis ke aplikasi tertentu. Sistem yang kita gunakan sudah memakai teknologi informasi tetapi belum ada aplikasi tertentu. Kemarin kita masih menggunakan yang namanya *Microsoft Excel* dan membuat aplikasi tersendiri. Sebenarnya, kalau bicara tentang manual, itu tidak juga. Kenapa di aplikasi yang kita bangun walaupun dalam basisnya yang masih excel, sebenarnya ada bagusnya di mana pada saat kita menginput itu sudah ada outputnya dan yang menjadi beban adalah pada saat awal melakukan semacam anggaran baru yang agak merepotkan adalah bagaimana membuat, dan menyusun melalui *Microsoft Excel*. Jadi setiap APBD berubah, kita harus menyusun lagi dari awal. APBD yang kita ambil, disusun dan disesuaikan dengan aturan-aturan dan format-format baku yang ada.”(Wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu 19 Juni 2019).

Dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sejak tahun 2002 telah menggunakan sistem informasi keuangan daerah terutama dalam hal penyusunan APBD, serta SAKD sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan rekonsiliasi dengan SKPD sebagai entitas akuntansi yang masih diparalelkan dengan sistem manual. Hal ini senada dengan pernyataan Kepala Bidang Akuntansi, mengatakan hal yang tidak jauh berbeda sebagai berikut :

“Dari tahun 2002 sampai tahun 2014 kita menggunakan *excel* dan saya sendiri yang harus menyusun rumus-rumus *excel* link dari A sampai Z yang menghasilkan laporan yang sangat tebal. Dan bisa dibayangkan bagaimana repotnya membuat itu. Pada saat adanya PP 71 yang mengisyaratkan semua Pemerintah Kabupaten Kota diseluruh Indonesia harus menggunakan basis akrual untuk menyusun laporan keuangan. Sebenarnya saya masih bisa menggunakan *excel* tetapi alangkah janggalnya kalau semua daerah sudah menggunakan aplikasi dan kita masih bertahan dengan sistem yang lama. Gowa sejauh ini sudah 5 kali mendapat WTP dan itu membuat kita bangga karena pada saat kita masih menggunakan sistem manual kita bisa mendapatkan WTP dan setelah beralih ke aplikasi kita masih bisa mempertahankan WTP itu. Maka dari itu, saya bicara sama pimpinan untuk kerjasama dengan instansi-instansi lain yang bisa menyiapkan kita aplikasi. Kemudian kita jejak dan kerjasama dengan BPKP, BPKP menyiapkan suatu sistem yang namanya sistem aplikasi untuk mengelola keuangan daerah yaitu SIMDA keuangan. Waktu itu, kita masih baru menggunakan SIMDA yaitu pada tahun 2015 dan setelah baru setahun

menggunakannya tetapi kita masih tetap mendapatkan opini WTP pada waktu itu.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi, Rabu 19 Juni 2019).

Hasil percakapan dari sebuah wawancara di kantor pagi itu menunjukkan bahwa pegawai selaku pengguna yang menyusun laporan keuangan, justru merasa terbebani dengan penggunaan sistem manual (*Microsoft Excel*) yang terkesan rumit. Dikarenakan pada saat menggunakan *Microsoft Excel* yang dipasang semua adalah rumus, jadi setiap SKPD terdiri dari 5 *sheet* pada saat menggunakan *excel*, dari keseluruhan skpd yang ada 50 SKPD dikali 5 *sheet*, berarti 250 *sheet* ditambah lagi dengan rekapan-rekapan yang harus dibuat, jadi kurang lebih sekitar 300an *sheet*. Secara logika menggunakan sistem manual bikin merepotkan, rumusnya juga rumus link semua. Jadi SKPD A diinput sudah bisa lanjut ke rekapnya, SKPD di input bertambah masuk menjadi rekap. Jadi setiap di input per SKPD itu outputnya direkap. Berbeda dengan menggunakan SIMDA, jadi SIMDA merupakan sistem link, linknya dari penganggaran. Mulai dari penganggaran, dari penganggaran itu ada namanya proses, prosesnya itu namanya penatausahaan. Ditatausahakan mulai dari proses perencanaan masuk disitu masalah pengelolaannya pada saat meminta dan memakai anggaran dan terakhir ke pelaporannya. Pelaporannya bagian SIMDA juga makanya linknya ada 3 yaitu penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis akrual memerlukan dukungan program yang mampu mengelola ribuan transaksi secara cepat, tepat, dan akurat serta didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola sistem tersebut sehingga menghasilkan capaian target yang maksimal. Menurut Pulungan (2015), proses pengelolaan keuangan daerah masih dihadapkan pada permasalahan pokok, yang terdiri dari masalah sumber

daya manusia, masalah peraturan perundang-undangan, dan masalah infrastruktur. Permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM); masih lemahnya sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah khususnya pemahaman SDM untuk mengelola SIMDA.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa :

“Dari kesiapan SDM, di satu sisi harus betul-betul diperhatikan karena bagaimanapun canggihnya suatu sistem, kalau SDMnya yang tidak mempuni atau kurang maka sistemnya tidak bisa berjalan secara totalitas. Makanya yang pertama harus diperhatikan adalah SDMnya. Di Pemda, setiap tahun kita akan melakukan diklat-diklat, jadi kita mengambil pemateri dari BPKP secara langsung dan kita ikutkan semua yang ada di SKPD. Cuma kembali lagi karena ini hanya teknis dan tidak ada akademik, makanya perlu penyesuaian yang baru dan yang penting dalam hal ini adalah mereka yang mempunyai *basic* pengetahuan tentang komputer. Kedua, setidaknya ada pengetahuan seputar yang namanya akuntansi dan walaupun belum ada kita masih bisa bentuk melalui pelatihan tersebut.”(Wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu 19 Juni 2019)

Dalam lembaga pemerintah daerah sumber daya manusia harus mendapat manajemen pengolahan yang baik melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan sehingga nantinya akan dapat memberikan manfaat terhadap pemerintah daerah. Sedangkan menurut Kepala bidang akuntansi, mengatakan hal yang tidak jauh berbeda yaitu bahwa:

“Setiap tahun karena keterbatasan anggaran kita cuma bisa satu kali satu tahun, disitu kita ikutkan khusus yang mengelola SIMDA dan yang menyusun laporan keuangan. Jadi kita laksanakan itu peningkatan kualitas SDM melalui diklat-diklat, kadang juga dikirim ada permintaan dari BPKP kita kirim kesana untuk mengikuti, atau permintaan dari instansi lain yang sesuai dengan tupoksi kita disini, kita kirim teman-teman untuk mengikuti diklat itu. Dengan harapan selesai mereka disana ada peningkatan SDM yang mereka kemarin tidak tahu menjadi lebih tahu. Kenapa? Karena walaupun aplikasinya sederhana tetapi didalamnya itu rumit dan harus betul-betul

dimengerti. Kalau kita tidak bisa mengerti susah juga. Di dalamnya itu macam-macam mulai dari penganggarannya sampai ke pelaporannya ada di SIMDA.”(Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi, Rabu 19 Juni 2019).

Pernyataan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pendidikan bukanlah masalah, karena SIMDA dirancang dengan interface yang baik, asalkan individu mau belajar maka ia dapat memahami dan menggunakan SIMDA. Hal ini terlebih lagi adanya dilema antara dasar pendidikan TI dengan dasar pendidikan akuntansi. Seorang pengguna dengan latar TI mungkin dapat sangat memahami SIMDA namun kurang paham dalam segi akuntansi. Sementara itu, seorang pengguna dengan latar akuntansi dapat bermasalah dengan TI. Karena tidak bertopang pada latar belakang pendidikan formal, maka kompetensi dari SDM SIMDA harus bertopang pada kinerja diklat. Hal pertama yang diajarkan adalah bagaimana menggunakan SIMDA. Pelatihan dasar ini mencakuplah cara menginput data anggaran dan penatausahaan, cara membuat laporan, cara melakukan peninjauan, dan cara melakukan analisis. Pelatihan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berkoordinasi dengan BPKP sebagai pemegang hak cipta dari SIMDA. Pelatihan dilakukan pada seluruh pengguna SIMDA.

2. Masalah Infrastruktur; penerapan SIMDA memerlukan akses internet yang baik di seluruh wilayah SKPD berada, karena SIMDA secara online mengharuskan seluruh proses keuangan daerah dilaksanakan secara online, untuk itu fasilitas untuk mendukung proses keuangan secara online tersebut harus tersedia dengan baik. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini baru beberapa wilayah SKPD yang mampu mengakses internet.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa:

“Memang dukungan infrastruktur dalam menerapkan aplikasi simda masih belum optimal karena tidak semua wilayah SKPD dapat diakses, terutama SKPD yang berada di wilayah Kecamatan dan Kelurahan. Padahal untuk proses pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA harus didukung dengan adanya akses internet. Kita masih terkendala di jaringan internet.”(Wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Selasa 16 Juli 2019).

Sarana yang diperlukan dalam implementasi SIMDA tergolong sederhana. Sarana yang diperlukan hanya berupa komputer, aplikasi SIMDA, dan jaringan internet. Aplikasi SIMDA diinstallkan ke dalam komputer sesuai petunjuk pemakaian yang dikeluarkan oleh BPKP. Setelah di instal, komputer harus dikoneksikan ke server lewat jaringan internet. Server SIMDA berada di BPKD yang menjadi lokasi server karena BPKD yang langsung menangani sistem informasi keuangan tersebut. Selain itu, hal yang tidak jauh berbeda di ungkapkan oleh Kepala Bidang Akuntansi bahwa:

“Tetapi yang mungkin masih menjadi nilai minus di kita, kita belum bisa memakai SIMDA secara online, SIMDA itu sudah *basic SQL server* jadi dia bisa digunakan secara online oleh siapapun dan bisa melalui jarak di dataran tinggi yang penting sudah bisa diakses. Cuma masalahnya di Gowa itu terdiri dari dua karakteristik daerah atau wilayah, ada dataran rendah ada dataran tinggi. Dataran tinggi belum bisa menjangkau akses informasi kesana atau akses jaringan internet itu, jarang ada yang sampai kesana makanya kita belum bisa memakai itu kecuali kalau kita bangun semacam perangkat untuk menghubungkan apakah pakai wireless atau melalui antena yang jelas ada caranya, itu yang kita belum ada. Dan yang kita gunakan masih sistem eksport import data melalui media apakah itu melalui *flashdisk* atau melalui *cd*. Tetapi mungkin kedepannya kita akan beralih kesitu kita benahi dulu dasar-dasar semacam keuangannya, SIMDA barangnya, kasnya semua. Sudah bagus dasarnya, peletakan dasarnya cukup bagus balik lagi penyampaian informasi berbasis *website*, onlinenya yang belum. Kita masih terkendala jaringan internetnya.”(Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi, Selasa 16 Juli 2019).

Pernyataan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIMDA yang berbasis desktop saat ini digunakan Pemda Gowa belum bisa

secara online dikarenakan terbatasnya bandwidth yang dimiliki, sehingga input data selalu dilakukan secara terpusat di lokasi server berada. Agar aplikasi SIMDA bisa di onlinekan dan mudah dioperasikan di berbagai sistem operasi, desktop dan lain sebagainya diperlukan membangun sistem jaringan yang handal dan mempermudah mengelola jaringan dengan skala yang lebih luas dengan sistem keamanan yang handal agar bisa mengakses sisi server. Maka kedepannya jika Pemda Gowa sudah menerapkan SIMDA secara online, setiap staf kantor-kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Dinas dan Kantor SKPD yang lainnya yang ingin menginput data ke aplikasi desktop yang berada di Kantor pusat- data/BPKD dapat dengan langsung menginput data di lokasi mereka sendiri, tanpa harus datang ke kantor pusat/BPKD.

Penerapan SIMDA pada pemerintah daerah sebagai suatu organisasi sektor publik dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan pada lingkungan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya dan aset yang ada pada pemerintah daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Akuntansi, yang menyatakan bahwa :

“Kalau berbicara tentang kualitas, itu sudah pasti lebih berkualitas dari sistem yang digunakan sebelumnya, artinya begini secara kualitas laporan tidak terlalu signifikan tapi secara mempermudah dengan mendapatkan itu iya agak lebih mudahnya, tingkat kesalahan bisa dikurangi, tingkat kerepotan bisa diminimalisir, mengurangi beban kerja. Tetapi satu yang kita harapkan bukan berarti kita harus berlepas tangan dari itu, masih tetap harus mengawasi, walaupun bagaimana canggihnya suatu laporan kalau salah masukannya salah keluarnya jadi *human error* itu masih tetap ada, itu yang kita harus minimalisir, karena teman-teman itu kan artinya baru beradaptasi baru mengenal yang namanya SIMDA, yang kemarin otaknya dipenuhi oleh *excel* sekarang masuk harus menyesuaikan dengan SIMDA, jadi itu yang

harus kita ubah pola pikir mereka menuju aplikasi.”(Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi, Selasa 16 Juli 2019).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan penerapan SIMDA di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa hanya memberikan kemudahan dan efisiensi waktu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Penerapan SIMDA masih harus dilakukan pengawasan agar human error yang masih sering terjadi dapat diatasi. Meskipun suatu kinerja yang bagus ditunjang dengan sistem atau aplikasi yang bagus akan menghasilkan output yang berkualitas. Namun kenyataannya di Pemda Gowa mengenai kualitas informasi laporan keuangan dengan menggunakan SIMDA masih sama kualitasnya jika menggunakan sistem manual.

B. Pembahasan

a) Tolak Ukur Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

Efektivitas Sistem Informasi dapat diukur dengan menentukan indikator-indikator yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti di Kabupaten Gowa seperti berikut :

1. Indikator keamanan data berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi illegal access dan kerusakan pada sistem.
2. Indikator waktu berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu

laporan, baik secara periodik maupun nonperiodik, untuk rentang waktu yang telah ditentukan.

3. Indikator ketelitian berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada volume data yang besar biasanya terdapat dua jenis kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan.
4. Indikator variasi laporan atau output berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.
5. Indikator relevansi menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Indikator relevansi menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan.

b) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai Objek Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi di Pemda Gowa.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses

pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah.

SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog public dalam perumusan kebijakan. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Menurut Djaja dalam (Budiman, Fuad dan Arza, Fefri Indra. 2013), Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sistem di definisikan oleh Wilkinson (1992) dalam Mulyono (2009) Siste adalah suatu kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran atau lebih, sedangkan menurut McLoad dan Schell, (2001) Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Informasi menurut Supriyanto, (2005) adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat

dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang, sedangkan informasi menurut Wilkinson (1992) merupakan komoditas vital bagi sebuah organisasi atau perusahaan, yang terdiri dari data yang telah ditransformasikan dan dibuat lebih bernilai melalui pemrosesan.

Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Tujuan diterapkan aplikasi SIMDA (BPKP. 2008) adalah :

1. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
2. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
3. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
4. Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-governemen; dan e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan good government.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

1. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
2. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
3. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
 - a) Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan

- b) Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

Klasifikasi SIMDA

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu :

1. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
2. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
3. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/ Lembaga.

Unsur SIMDA

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP,2008),

1. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
2. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait;
3. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik; dan

4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan (Satgas Pengembangan SIMDA, 2008)

1. Penganggaran
 - a) Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - b) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
 - c) Surat Penyediaan Dana (SPD)
2. Penatausahaan
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - b) Surat Perintah Membayar (SPM)
 - c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - d) Surat Tanda Setoran (STS)
 - e) Register dan
 - f) Surat pengendalian lainnya
3. Akuntansi dan Pelaporan

- a) Jurnal
 - b) Buku Besar
 - c) Buku Pembantu
 - d) Laporan Realisasi Anggaran
 - e) Laporan Perubahan SAL (saldo anggaran lebih)
 - f) Laporan Arus Kas
 - g) Neraca
4. Program Aplikasi SIMDA Keuangan didukung dengan :
- a) Buku manual sistem dan prosedur penganggaran;
 - b) Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan;
 - c) Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan; dan
 - d) Buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA Keuangan.

Fungsi Program Aplikasi SIMDA Keuangan

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan adalah :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban)
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
5. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit.

Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan adalah:

1. Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan;
2. Berbasis windows;
3. Validasi Inputan data lebih terjamin;
4. Terdapat menu otoritas dan unit otoritas;
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi; dan
6. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya:

1. Sesuai Peraturan. Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
2. Kesiambungan Maintenance. Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota propinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.
3. Transfer of Knowledge. Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional

sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan “satu kali untuk selamanya.”

4. Terintegrasi. SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis. Sehingga, setiap transaksi keuangan yang terjadi, dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

Pembiayaan Penerapan SIMDA Keuangan

Biaya yang dikenakan terhadap atas program aplikasi SIMDA ini dapat dikatakan gratis atau tanpa biaya. Jika dibandingkan dengan program aplikasilainnya, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mencapai ratusan juta hingga milyaran, tergantung pada jumlah komputer pengguna yang ingin dipasang program tersebut. Hal inilah yang membuat SIMDA menjadi pilihan utama berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk dijadikan sebagai basis sistem informasi keuangannya.

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA, hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses-proses pelatihan yang nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Besaran jumlah dana yang dibutuhkan untuk proses asistensi implementasi ataupun pendidikan dan pelatihan SIMDA ini, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-

masing pemerintah daerah. Artinya, setiap pemerintah daerah tidak akan dibebankan biaya yang melampaui kemampuan keuangannya.

Peraturan Pemerintah Daerah Terkait SIMDA (Satgas Pengembangan SIMDA, 2011)

BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menuju terwujudnya good governance.

Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini adalah:

1. Menyediakan Data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset Daerah, kepegawaian/aparat daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi Pemerintah Daerah
2. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
3. Mempersiapkan aparat Daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan Teknologi Informasi yang lebih baik.
4. Memperkuat basis Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah

c) Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Secara Manual dan Penggunaan SIMDA

Berdasarkan pada hasil wawancara, pada saat menggunakan *Microsoft Excel* yang di pasang semua adalah rumus, jadi setiap SKPD terdiri dari 5 *sheet* pada saat menggunakan *excel*, dari keseluruhan SKPD yang ada 50 SKPD di kali 5 *sheet*, berarti 250 *sheet* ditambah lagi dengan rekapan-rekapan yang harus dibuat, jadi kurang lebih sekitar 300an *sheet*. Secara logikanya, menggunakan sistem manual bikin merepotkan. SKPD di input bertambah masuk menjadi rekap, jadi setiap di input per SKPD itu outputnya direkap.

Berbeda dengan menggunakan SIMDA yang menggunakan sistem link dan linknya dari penganggaran. Mulai dari penganggaran, ada namanya proses panatausahaan dan ditatausahakan mulai dari proses perencanaan. Masuk di situ masuk, masalah pengelolaannya pada saat meminta dan memakai anggaran dan terakhir ke pelaporannya. Pelaporannya ada 3 link yaitu penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.

d) Ukuran Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) pada Pemerintah Daerah Kabuten GOWA

Ukuran keberhasilan sebuah sistem adalah efisiensi dan efektivitas. Efektivitas sebuah sistem diukur sejauh mana sistem tersebut mampu mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penggunaan SIMDA di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan sistem manual yang sebelumnya. Namun demikian, penggunaan SIMDA pada saat ini hanya memberi

kemudahan dan efisiensi waktu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Penerapan SIMDA masih perlu pengawasan agar *human error* yang masih sering terjadi dapat diatasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa saat ini belum begitu efektif. Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur dan masalah kesiapan SDM. Walaupun SIMDA Keuangan belum efektif diterapkan, tetapi dengan penerapan SIMDA Keuangan yang sebelumnya menggunakan sistem manual telah membawa keuntungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan aplikasi ini, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Output yang dihasilkan oleh sistem ini lebih terstruktur daripada penyusunan dengan sistem manual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan penerapan SIMDA Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sehingga lebih membawa dampak yang baik bagi pengelolaan keuangan dalam mewujudkan good governance. Adapun saran-saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain :

1. Pemahaman terhadap SIMDA Keuangan, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan masukan terkait penerapan SIMDA Keuangan agar kedepannya penerapan SIMDA Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dapat dijalankan dengan efektif dan maksimal.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitiannya, tidak hanya melihat pada satu SKPD saja sehingga dapat diketahui secara lebih luas implikasi dari penerapan SIMDA Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alannita., Suaryana. 2014. Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, dan Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi pada Kinerja Individu. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.1(2014):33-45.
- Awosejo, O.J, Kekwaletswe, R, M, Pretorius, P and Zuva, T. 2013. "The Effect of Accounting Information Systems in Accounting." *International Journal of Advanced Computer Research* 1(2):21–31.
- B, Marshal Romney, dan Steinbart, Paul John. 2009. Accounting Information Systems. USA: Cengage Learning.
- Barldwan, Zaki, M.Sc., Akuntan. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : BPFE.
- Bodnar, George H, William S, Hopwood, 2003. "Sistem Informasi Akuntansi", PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Andi.
- Dwijayanthi, Diah Maha. 2013. "Pengaruh Insentif, Tingkat Pendidikan, Pelatihan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Individu Pengguna Sistem Informasi Akuntansi SKPD DISPENDA Kota Denpasar." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4(2):332–44.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. 2015. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar.
- Grande, Urquia. 2011. "The Impact Of Accounting Information Systems (Ais) On Performance Measures: Empirical Evidence In Spanish Smes." *The International Journal of Digital Accounting Research* 11:1–25.
- Handoko, T. Hani. 1999. Manajemen. BPFE Yogyakarta : Yogyakarta
- Hartati, Sri dan Iswanti, Sari. 2008. Sistem Pakar dan Pengembangannya. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- James, A. Hall, 2007. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Ketiga, Terjemahan Amir Abadi Yusuf, Salemba Empat, Jakarta.
- Jumaili, Salman. 2005. "Kepercayaan Terhadap Teknologi Sistem Informasi Baru Dalam Evaluasi Kinerja Individual" Kumpulan Materi Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo , 16 September 2005.
- Kristiani, Wahyu. 2012. Analisis Pengaruh Efektivitas Tekhnologi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Individual. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Muh. Arief Effendi.2016.The Power of Good Corporate Governance.Edisi 2.Jakarta: Salemba Empat.

- Puspita, Lilis dan Anggadini, Sri Dewi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Pangesso, NF. 2014. Efektivitas Penggunaan dan Kepercayaan atas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Karyawan. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin.
- Sajady,H., M.Dastgir, dan H. Hashem Nejad. 2008. Evaluation of The Effectiveness of Accounting Information Systems. *International Journal of Information Science and Technology*.
- Rizaldi, Fahmi. 2015. "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan CV Teguh Karya Utama Surabaya." *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 10.
- Romney, Marshall B., Paul J. Steinbart, Barry E. Cushing, 1997, *Accounting Information System*, seventh edition, United State of America: Addison Wesley Publishing Company, Inc.
- Sari, Maria M. Ratna. 2009. "Pengaruh Efektivitas Penggunaan dan Kepercayaan terhadap Teknologi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Individual pada Pasar Swalayan di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 4(1).
- Septriani, Evy. 2010. Pengaruh Kinerja Sistem terhadap Kepuasan Pengguna pada PT. Bank Muamalat Indonesia (Tbk). *Jurnal Program Magister Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma*. Jakarta.
- Suratini, Ni Putu Eka, Ni Kadek Sinarwati, dan Ananta Wikrama Atmadja Atmadja. 2015. "Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Penggunaan Teknologii Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Singaraja." *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Volume : 3 No 1.
- Shofi, Nur, dkk. 2016. Pengaruh Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Kepercayaan terhadap Sistem Informasi Akuntansi, Kemampuan Tekhnik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi dan Kenyamanan Fisik terhadap Kinerja Individu. *Jurnal ISSN: 1907-426X* Vol.11 No. 2.
- Viprapastha, Tiksnayana. 2016. "Pengaruh faktor-faktor kinerja individual karyawan terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi," *e-journal akuntansi Universitas Udayana* Vol. 15, No. 2, 1826-1855.
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Erlangga: Jakarta
- Wilkinson, Joseph W dan Cerullo, Michael J, 2000, *Accounting Information System, Essential Concept and Application, fourth edition, John Wiley & Sons, Inc, USA*
- Zulian Yamit. 2003. *Manajemen Persediaan*. Yogyakarta : Ekonisia.

HASIL WAWANCARA

Informan 1

Nama : H. Abd. Karim Dania, SE, MM

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019

Penerapan SIMDA

1. Bagaimana perubahan dari sistem manual ke sistem yang berbasis teknologi informasi yaitu SIMDA sebagai sistem informasi akuntansi daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa?

Informan :

Sebenarnya manual bukan 100% manual, sistem yang kami pakai kenapa kita bilang manual karena kita belum berbasis ke aplikasi tertentu, yang kita masih pakai memang sudah memakai teknologi informasi tetapi belum ada aplikasi tertentu yang kita pakai. Kemarin kita masih memakai yang namanya Microsoft excel, itu yang kita pakai dengan membuat aplikasi tersendiri. Sebenarnya kalo kita bicara manual ya itu tidak juga, kenapa di aplikasi yang kita bangun walaupun dalam basisnya masih excel kan itu sebenarnya bagus juga karena pada saat kita menginput itu sudah ada outputnya, artinya yang menjadi beban bagi kita adalah pada saat awal kita melakukan semacam anggaran baru yang bikin repot adalah bagaimana membuat, menyusun melalui Microsoft Excel. Jadi setiap APBD berubah kita harus nyusun lagi dari awal, APBD kita ambil kita susun kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, dengan format-format baku yang ada itulah yang kita pakai.

2. Bagaimana kesiapan SDM dengan perubahan sistem tersebut?

Informan :

Kesiapan SDM disatu sisi harus betul-betul diperhatikan karena bagaimanapun canggihnya suatu sistem kalau SDMnya yang tidak mempunyai atau kurang maka sistemnya tidak bisa berjalan secara totalitas makanya yang pertama harus diperhatikan adalah SDMnya. Kita di sini di Pemda setiap tahun kita lakukan diklat-diklat, jadi kita ngambil pemateri dari BPKP secara langsung dan kita ikutkan semua yang ada di SKPD. Cuma kembali lagi karena ini teknis tidak ada di akademik, makanya perlu penyesuaian yang baru, yang penting dalam hal ini adalah mereka mempunyai basic pengetahuan tentang komputer. Kenapa karena kita mau bermain-main dengan komputer. Yang kedua paling tidak ada pengetahuan seputar yang namanya akuntansi, walaupun belum ada kita bentuk disana. Akuntansinya itu bagaimana menjurnalnya karena di Simda itu ada jurnal didalamnya. Kalau menjurnal ini debetnya ini kreditnya tidak boleh salah, kalau salah nanti salah juga akhirnya. Makanya disitu kita didik.

3. Apakah saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa didalam menjalankan sistem tersebut untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah?

Informan :

Cuma yang menjadi permasalahannya kita di daerah, ndatau lah ini orang pusat yang punya kerjaan, kita cuma berbicara masalah kita di daerah sendiri, kita yang rasakan kok. Kita jadi pelaku bukan mereka, mereka cuma membuat aturan. Sekarang ini aturannya masih beda antara penganggaran dengan pelaporan masih beda Permendagrinya, penganggaran masih pakai Permendagri 13 sementara pelaporan masih pakai Permendagri 64 notabnya tidak bisa sama, makanya ada namanya mapping anggaran, kadang dianggarkan di permendagri 13 di A taruhlah, tapi di permendagri 64 tidak boleh dilaporkan di A harus dilaporkan di B, makanya ada mappingnya, A dimaping ke B, dimaping dipindahkan. jadi harapan kita tidak perlu ada perbedaan aturan ini. Paling tidak, ada semacam regulasi bahwa itu mappingnya harus ke B, mappingnya harus ke C supaya lebih jelas, lebih teratur dan semua daerah sama. Ini kan kalau mappingnya tidak ada artinya

saya maping tergantung dari persepsi saya. Antara penganggaran dan pelaporan tidak perlu ada perbedaan aturan.

4. Bagaimana dukungan infrastruktur dalam penerapan sistem tersebut?

Informan :

Dukungan infrastruktur dalam menerapkan aplikasi simda masih belum optimal karena tidak semua wilayah SKPD dapat diakses, terutama SKPD yang berada di wilayah Kecamatan dan Kelurahan. Padahal untuk proses pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA harus didukung dengan adanya akses internet. Kita masih terkendala di jaringan internet.

Informan 2

Nama : Mahmud, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi
Tanggal : Selasa, 16 Juli 2019

Penerapan SIMDA

1. Bagaimana perubahan dari sistem manual ke sistem yang berbasis teknologi informasi yaitu SIMDA sebagai sistem informasi akuntansi daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa?

Informan :

Dari tahun 2002 sampe tahun 2014 kita pakai excel, dan saya sendiri yang buat itu, saya pelakunya yang buat itu yang harus menyusun rumus-rumus excel link dari A sampai Z yang menghasilkan laporan setebal itu. Kan tidak bisa terbayang itu bagaimana repotnya. Makanya pada saat ada PP 71 yang mengisyaratkan semua Pemerintah Kabupaten Kota diseluruh Indonesia harus memakai basis akrual untuk menyusun laporan keuangan. Saya sebenarnya masih bisa pakai excel tetapi alangkah janggalnya kalo daerah semua sudah pakai aplikasi, kita sendiri yang masih tetap bertahan. Ada memang kemarin kita dapat WTP, Gowa sudah 5 kali dapat WTP tetapi ada rasa tersendiri mungkin, artinya begini kita masih pakai manual tetapi kita bisa dapat WTP loh. Ada semacam rasa bangga tersendiri, tetapi rasa bangga itulah yang sebenarnya kita tidak bisa mempertahankan untuk menggunakan manual itu, bagaimana manual itu dapat WTP kita beralih ke aplikasi dengan tetap membawa wtp itu. Makanya kemarin saya bicara sama pimpinan kalo bisa kita kerjasama saja dengan instansi-instansi lain yang bisa menyiapkan kita aplikasi. Kemudian kita jajaki kita kerjasama dengan BPKP, BPKP menyiapkan yang namanya sistem aplikasi untuk mengelola keuangan daerah Namanya SIMDA keuangan. Jadi kita tetap kerjasama dengan mereka, kita masih baru menggunakan SIMDA tahun 2015. Kita tetap bersyukur baru 1 tahun pakai tapi masih tetap mendapat opini WTP.

2. Bagaimana kesiapan SDM dengan perubahan sistem tersebut?

Informan :

Makanya setiap tahun karena keterbatasan anggaran kita cuma bisa satu kali satu tahun, disitu kita ikutkan khusus yang mengelola SIMDA dan yang menyusun laporan keuangan. Jadi kita laksanakan itu peningkatan kualitas SDM melalui diklat-diklat, kadang juga dikirim ada permintaan dari BPKP kita kirim kesana untuk ikut, atau permintaan dari instansi lain yang sesuai dengan tupoksi kita disini, kita kirim teman-teman untuk mengikuti diklat itu dengan harapan selesai mereka disana ada peningkatan SDM yang mereka kemarin tidak tahu menjadi lebih tahulah. Karena memang sih sederhana aplikasinya tetapi didalamnya itu rumit harus betul-betul dimengerti. Kalau kita tidak bisa mengerti susah juga. Di dalamnya itu macam-macam mulai dari penganggarannya sampai ke pelaporannya ada itu di simda.

3. Apakah saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa didalam menjalankan sistem tersebut untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah?

Informan :

Permendagri 64 yang kita pakai untuk nyusun diatasnya ada PP 71 masalah SAP kan. Payung pemeriksa itu adalah PP 71, sementara kita menyusun pakai Permendagri 64. Ada namanya Laporan Operasional (LO) kan, di Laporan Operasional ada namanya pendapatan LO, ada namanya beban. Di beban itu ada beban pegawai, beban barang jasa, ada beban bunga dll, itu di Permendagri. Sementara di PP 71 beban barang jasa itu dibagi menjadi 4, beban pemeliharaan, beban persediaan, beban tunjangan dinas dan ada beban jasa, sementara di Permendagri cuma satu yaitu beban barang jasa. Sementara pemeriksa kiblatnya di PP 71 karena itu yang tertinggi PP, Peraturan Pemerintah itu lebih tinggi dari Permendagri. mau tidak mau kita harus ikuti. Bagaimana caranya, saya ambil outputnya saya modifikasi ikut PP 71, jadi kita masih tetap pakai Simda tapi tidak 100% kita pakai itu karena belum sesuai dengan PP 71. Nah kalau tidak pakai permendagri 64 susah juga, kalau di PP 71 cuma globalnya doang, yang ada rekening-rekeningnya itu rekening pembebanannya itu di permendagri 64 jadi kalo mau buat

aplikasi harus pakai permendagri 64. Jadi kadang kita masih terbentur aturan yang setiap saat selalu berubah.

4. Bagaimana dukungan infrastruktur dalam penerapan sistem tersebut?

Informan :

Tetapi yang mungkin masih menjadi nilai minus di kita, kita belum bias memakai simda secara online, jadi dia bisa memakai online siapapun bias melalui jarak di dataran tinggi yang penting sudah bisa ada akses. Cuma masalahnya kita Gowa itu terdiri dari dua karakteristik daerah atau wilayah, ada dataran rendah ada dataran tinggi. Dataran tinggi belum bisa menjangkau akses informasi kesana atau akses jaringan internet itu, jarang ada yang sampai kesana makanya kita belum bisa memakai itu, yang kita pakai masih sistem ekspor import data melalui media, apakah melalui flashdisk atau melalui cd masih itu yang kita pakai tetapi mungkin kedepannya kita akan beralih kesitu. Kita benahi dulu dasar-dasar semacam keuangannya, simda barangnya, kasnya semua. Sudah bagus dasarnya peletakan dasarnya cukup bagus balik lagi penyampaian informasi berbasis website, onlinenya yang belum. Kita masih terkendala jaringan internetnya.

5. Apakah dengan penerapan SIMDA sebagai sistem informasi akuntansi keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa?

Informan :

Kalau berbicara secara kualitas memang iya sih, artinya begini secara kualitas laporan tidak terlalu signifikan tapi secara mempermudah dengan mendapatkan itu iya agak lebih mudahlah, tingkat kesalahan bisa dikurangi, tingkat kerepotan bisa diminimalisir, yang tadinya kita setengah mati sekarang sudah tidak setengah mati lagi, mengurangi beban kerja. Tetapi satu yang kita harapkan, bukan berarti kita harus berlepas tangan dari itu, masih tetap harus mengawasi, walaupun bagaimana canggihnya suatu laporan kalau salah masukannya salah keluarnya jadi human error itu masih tetap ada, itu yang kita harus minimalisir, karena teman-teman itu kan artinya baru beradaptasi baru mengenal yang namanya simda, yang kemarin

otaknya dipenuhi oleh excel sekarang masuk simda, jadi itu yang harus kita rubah pola pikir mereka menuju aplikasi.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

